

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 5

ABSTRAK	:	- Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber air tanah wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras; Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan air tanah yang selaras perlu adanya pengaturan izin pengelolaan air tanah.
		Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang : <ul style="list-style-type: none">- Ketentuan Umum- Azas Pengelolaan- Pengelolaan- Inventarisasi- Perencanaan Pendayagunaan- Konservasi- Peruntukan Pemanfaatan- Perizinan- Pembinaan- Pengendalian dan Pengawasan- Penyidikan- Sanksi Administrasi- Ketentuan Pidana- Ketentuan Peralihan- Ketentuan Penutup
DASAR HUKUM	:	- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

		<p>Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Peraturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2007 tentang Cekungan Air Tanah; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.</p>
STATUS	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
		- Diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2011.
CATATAN	:	- Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa peraturan daerah yang mengatur jenis-jenis retribusi daerah selain yang tersebut dalam undang-undang tersebut diberi batas berlaku paling lama 1(satu) tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2009 perlu diganti dan cukup memuat regulasi perizinan pengelolaan air tanah saja.